

Sesudah berusia hampir 60 tahun, Kepolisian Indonesia baru memiliki Komisi Kepolisian Nasional atau Kopolnas dengan tugas-tugas yang pada dasarnya menjaga dan menaikkan martabat Kepolisian negeri kita.

Menjadi Polisi Untuk Polisi

Oleh : Satjipto Rahardjo

Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

PRESIDEN juga telah memutuskan untuk mengangkat sejumlah anggota Kopolnas dari unsur Kepolisian, masyarakat, dan pakar. Apakah hanya karena telah dibentuk "Komisi Yudisial" dan "Komisi Kejaksaan", maka perlu ada komisi untuk Polisi?

Mengontrol kecenderungan buruk

Kepolisian adalah institusi yang diberi otoritas publik luar biasa karena diberi kewenangan untuk mengontrol masyarakat secara fisik, seperti menangkap, menahan dan menginterogasi, bahkan menggunakan kekerasan bila perlu. Kewenangan Presidenpun tidak sebesar itu, artinya untuk langsung bertindak dan menindak seseorang secara fisik. Presiden Abdurahman Wahid dulu

pernah memerintahkan "Tangkap orang itu!" karena dia sendiri tidak berwenang untuk menangkapnya. Polisi tidak perlu memerintahkan orang lain untuk menangkap seseorang, karena dia bisa dan boleh melakukannya. Polisi menahan seseorang karena Undang-Undang memberi kewenangan dan kekuasaan. Tetapi apakah tindakan itu berdasar alasan yang dibenarkan hukum? apakah alasan seorang Polisi untuk menangkap seseorang? karena ada petunjuk kuat akan melakukan kejahatan? betulkah petunjuk itu? tidak mungkinkah Polisi "mengarang" sendiri suatu alasan? Ungkapan Lord Akton, *power tends to corrupt*, juga berlaku untuk Polisi yang diberi kekuasaan istimewa. Sebaiknya Kopolnas menyusun rancangan agar hal

seperti itu tidak terjadi atau setidaknya ditekan sampai titik minimum.

Persekongkolan jahat Polisi

Karena memiliki otoritas dan kekuasaan yang besar, maka aneka kemungkinan negatif bisa terjadi. Demi menjaga citra Polri, ada baiknya Kopolnas ikut menjaga agar para Polisi kita tidak terjatuh ke dalam "kenistaan", seperti pernah terjadi pada Kepolisian Negara New South Wales (NSW), Australia. Sekitar 10 tahun lalu, ditulis kemungkinan Polisi melakukan persekongkolan kejahatan ("Polisi dan persekongkolan jahat", Kompas, 29/8/1996). Harian Kompas, pernah membuat laporan yang bagus sekali tentang persekongkolan jahat Polisi, atau mafia Polisi Sidney, NSW (Kompas, 19/



8/1996). Laporan itu membuka mata kita tentang apa yang bisa terjadi di Kepolisian manakala kita tidak waspada mencegahnya sejak dini.

Dilaporkan, ada kelompok kecil Polisi dalam Kepolisian NSW yang bekerja sama dengan kelompok mafia heroin, melindungi kejahatan, dan memaksa meminta uang dari para pelacur (pelacuran dilarang di NSW) dan pemilik toko di daerah lampu merah King Cross.

Kelompok kecil yang bekerja secara tertutup itu terbongkar berkat kerja gigih *Komisi Wood* dan kesediaan seorang Polisi anggota komplotan, membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Polisi tidak mungkin melakukan hal negatif jika ia tidak diberi kewenangan untuk mengontrol masyarakat.

Tetapi kekuasaan itu diberikan karena tanpa itu Polisi tidak akan bisa menembus dunia kejahatan. Misalnya, dalam kasus yang dikenal sebagai *dropsy cases*. Polisi Amerika yang sulit menembus jaringan komplotan heroin harus menciptakan teknik sendiri guna menangkap basah pengedar. Itu dilakukan dengan tiba-tiba menangkap seorang yang sudah lama dicurigai dengan dalih, satu bungkus heroin telah jatuh dari kantongnya, pada hal Polisi sendiri yang "memasang" bungkus heroin itu. Jadi segalanya akan tergantung Polisi sendiri, apakah kekuasaan akan digunakan bagi hal



yang "baik" atau "tidak baik". Di sinilah peran penting Kompolnas untuk menjaga dan mendorong agar Polisi menggunakan kekuasaan untuk sebesar-besar kemanfaatan sosial.

Tradisi yang baik diteruskan

Di tengah cerita-cerita kurang baik tentang Polri, saya masih memiliki optimisme terhadap Polisi Indonesia. Optimisme itu didasarkan pada beberapa pengalaman selama bergaul dengan Polisi kita.

Pertama, Polisi Indonesia itu unik. Di tengah atmosfer korup di Indonesia, yang justru berusaha ditutup-tutupi oleh instansi-instansi yang korup, Polri justru terus terang membuka borok sendiri dan menunjukkannya kepada masyarakat. Hal itu terjadi di bawah Kepala Polri Kunarto, yang sekian puluh tahun lalu mengadakan seminar "Suap menyuap Polisi di Jalan". Dalam seminar di Bandung itu dibebankan bagaimana proses itu terjadi dan kemana saja uang itu mengalir.

Kedua, di bawah Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Farouk Mohammad, mahasiswa PTIK dikerahkan untuk membuat laporan tentang realitas pelayanan yang dilakukan Polri. Dari penelitian itu terungkap, alih-

alih memberi pelayanan seperti moto "Melindungi dan Melayani", Polisi kita lebih banyak minta dilayani publik. "Temuan buruk" hasil penelitian itu tidak lalu disembunyikan dalam laci, tetapi dibebankan ke masyarakat melalui seminar.

Cerita sukses dari Polda Jawa Tengah, dibawah Kepala Polda Muslihat, dengan proyek "Bintara Pembina Keamanan dan Keterlibatan Desa" kurang gaungnya di masyarakat, padahal banyak surat dari masyarakat ditujukan ke Polda, menuturkan keberhasilan Polisi *in blue jeans* melayani publik secara memuaskan. Disitu terungkap Polisi memasang antenna TV, mencarikan dukun bayi, memimpin rapat di Kelurahan, memberi khotbah Jum'at, dan lain-lain. Semua itu dilakukan karena saat itu ada yang lebih berkuasa dari Polisi, proyek itu dihentikan.

Cerita dan pengalaman seperti itulah yang memberi optimisme jika dikelola dengan baik, Polri bisa memberi banyak prestasi yang membahagiakan rakyat. Kini Polri mempunyai mitra kerja Kompolnas. Maka menjadi tugas Kompolnas untuk menjaga, mendorong dan menjadi pekerjaan rumah Polri menerima kritik dari mitra barunya. **Yang buruk dirobahkan dan yang baik ditegakkan.*****

Polisi Indonesia itu unik. Di tengah atmosfer korup di Indonesia, yang justru berusaha ditutup-tutupi oleh instansi-instansi yang korup, Polri justru terus terang membuka borok sendiri dan menunjukkannya kepada masyarakat.